



PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR 170/14 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2022

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 141 Ayat (1) Tata Tertib DPRD Nomor 1 Tahun 2020 dinyatakan bahwa setelah penetapan Propemperda, DPRD dan/atau Bupati dapat mengajukan perubahan Propemperda;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 139 Ayat (4) Tata Tertib DPRD Nomor 1 Tahun 2020 dinyatakan bahwa Propemperda ditetapkan dengan Keputusan DPRD;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen tentang Perubahan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 80) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
6. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU

: Perubahan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2022 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

Perubahan Program Pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara DPRD dan Bupati Kebumen untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan rancangan Perda.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 27 Mei 2022

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN



Ketua,

SARIMUN

Lampiran : Keputusan DPRD Kabupaten Kebumen
 Nomor : 170/14 TAHUN 2022
 Tanggal : 27 Mei 2022

**PERUBAHAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
 KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2022**

No	Tentang	Maksud dan Tujuan	Pelaksanaan	Status		Disertai		Unit/ Instansi Terkait	Pem- bahasan
				Baru	Ubah	NA	Raperda		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Raperda tentang Perlindungan dan Pengelolaan Geopark Karangsambung Karangbolong Kebumen	Pemerintah Pusat telah menetapkan Kabupaten Kebumen sebagai Pusat Ilmu Kebumian terkait Geopark Karangsambung-Karangbolong	- Amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2019 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup - Amanat Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2019 tentang Taman Bumi	√		√		Komisi D	MS I
2.	Raperda tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani	Disusun untuk memberikan perlindungan dan pemberdayaan kepada Petani di Kabupaten Kebumen		√		√		Komisi B	MS I
3.	Raperda tentang Penataan dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan	Disusun sebagai dasar penataan dan pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan		√		√		DISPERIN DAG KUKM	MS I

4.	Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 20 Tahun 2012 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan	Mengatur perubahan perda penanggulangan kemiskinan	Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 20 Tahun 2012 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan		√		√	Bapem Perda	MS I
5.	Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 23 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kebumen Tahun 2011-2031	Disusun dengan tujuan evaluasi rencana tata ruang wilayah Kabupaten Kebumen	Amanat Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang		√		√	DPUPR	MS I
6.	Raperda tentang Perusahaan Perseroda Aneka Usaha	Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang BUMD	Delegasi	√		√		Bagian Perekonomian	MS I
7.	Raperda tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	Tindaklanjut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bangunan Gedung	Delegasi	√		√		DPUPR	MS I
8.	Raperda tentang Lambang Daerah	Kebijakan Daerah	Kebijakan	√		√		Bagian Pemerintahan	MS I
9.	Raperda tentang Bangunan Gedung	Tindaklanjut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang	Delegasi	√		√		DPUPR	MS II

		Penyelenggaraan Bangunan Gedung							
10.	Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021	Amanat Pasal 320 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah	Delegasi	√				BPKPD	Kumulatif /MS II
11.	Raperda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022	Amanat Pasal 317 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah	Delegasi	√				BPKPD	Kumulatif /MS II
12.	Raperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 13 Tahun 2020 tentang Penyertaan Modal pada BUMD Kabupaten Kebumen	Amanat Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang BUMD	Delegasi		√		√	Bagian Perekonomian	MS II
13.	Raperda tentang Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan	Mengubah ketentuan penyebutan nomenklatur dan tata cara pelaksanaan pelelangan	Kebijakan	√		√		DLHKP	MS II
14.	Raperda tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan	Mengubah persyaratan dan menghapus denda keterlambatan	Delegasi	√		√		DISDUK CAPIL	MS III
15.	Raperda tentang Sistem Kesehatan Daerah Kabupaten Kebumen	Sebagai pedoman penyelenggaraan urusan kesehatan	Inisiatif DPRD	√		√		Komisi B	MS III
16.	Raperda tentang Digitalisasi Transaksi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kebumen	Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dengan transaksi digital	Inisiatif DPRD	√		√		Komisi C	MS III
17.	Raperda tentang APBD Tahun Anggaran 2023	Amanat Pasal 311 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah	Delegasi	√				BPKPD	Kumulatif /MS III

18.	Raperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Menyesuaikan Permendagri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Permendagri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Delegasi		√		√	DINAS PMD	MS III
-----	---	---	----------	--	---	--	---	-----------	--------

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN



Ketua,
[Signature]
SARIMUN